

# **Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perbankan Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Pembiayaan**

**Datiani Setia Ningsih**

## **ABSTRACT**

This study aims to find out how the system of providing financing for small and medium enterprises, and to find out the internal banking control system that is applied in supporting the effectiveness of providing small and medium business financing at PT. Bank BNI Syariah Medan Branch Office.

The method used in this study is descriptive qualitative method that is data obtained based on the results of research, then processed, analyzed and interpreted using existing theories to then draw conclusions.

Based on the results of the study, the author draws the conclusion that the system of financing is applied to PT. Bank BNI Syariah Medan Branch Office the process is not too difficult and quite easy. And the application of an internal control system at PT. Bank BNI Syariah Medan Branch Office complies with COSO theory so that it can support the effectiveness of financing.

**Keywords: Financing System, Internal Control System**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian pembiayaan usaha kecil dan menengah, dan untuk mengetahui sistem pengendalian internal perbankan yang diterapkan dalam menunjang efektivitas pemberian pembiayaan usaha kecil dan menengah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, kemudian diproses, dianalisis serta diinterpretasikan menggunakan teori yang ada untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa sistem pemberian pembiayaan yang diterapkan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan prosesnya tidak terlalu sulit dan cukup mudah. Dan penerapan sistem pengendalian internal pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan telah sesuai dengan teori COSO sehingga dapat menunjang efektivitas pemberian pembiayaan.

**Kata Kunci : Sistem Pemberian Pembiayaan, Sistem Pengendalian Internal**

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan masyarakat, dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam

dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Semakin maju suatu Negara,

maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.<sup>1</sup> Dunia bisnis atau usaha khususnya sektor usaha kecil dan menengah menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Kondisi ini mewajibkan setiap pengusaha khususnya pengusaha kecil dan menengah harus melakukan upaya demi mewujudkan dan mempertahankan eksistensi usahanya. Masalah yang umumnya terjadi pada pengusaha kecil dan menengah adalah masalah permodalan. Salah satu cara mengatasi masalah permodalan yaitu dengan melakukan pembiayaan pada Bank.

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan merupakan cabang kesebelas dan didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 2002 yang diresmikan oleh Agoest Soebakti, Direktur Ritel Bank Negara Indonesia.<sup>2</sup> PT. Bank BNI Syariah adalah satu dari beberapa cara Bank BNI untuk melayani masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berdasarkan

prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI sebagai Universal Banking. Bank BNI Syariah Kc Medan dalam hal ini berperan dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan penyaluran pembiayaan dan membantu permodalan ke sektor usaha kecil dan menengah khususnya pada pengusaha di pasar-pasar yang berada di sekitar wilayah Medan.

Dengan peran serta bank BNI Syariah terhadap penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah diharapkan dapat membantu mengatasi masalah permodalan dan dapat meningkatkan kualitas usaha menjadi lebih baik, sehingga usaha kecil dan menengah dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Melalui usaha pemberian pembiayaan yang telah diberikan maka Bank BNI perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, dan bank harus merasa yakin bahwa nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Masalah keamanan atas pembiayaan yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian pembiayaan. Permasalahan ini

---

<sup>1</sup> Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : Rajawali Perss, 2010), hal. 1

<sup>2</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai di bidang pembiayaan. Dengan kata lain, diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian pembiayaan.

Dari permasalahan yang telah diuraikan, secara garis besarnya adalah sistem pemberian pembiayaan yang diberikan harus diimbangi pula dengan sistem pengendalian internal yang memadai. Karena apabila sistem pengendalian internal bank memadai maka tingkat keberhasilan pengembalian pembiayaan lebih baik. Dan begitu pula sebaliknya apabila sistem pengendalian internal bank tidak memadai maka tingkat keberhasilan pengembalian pembiayaan lebih rendah.

## 2. KAJIAN TEORI

Komponen Sistem pengendalian internal adalah proses untuk mendapatkan pengendalian yang memadai. Agar tujuan pengendalian intern tercapai, maka perusahaan harus mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian internal agar pengendalian internal terhadap perusahaan tersebut menjadi efektif.

Pada Oktober 1987, *The National Commission on Fraudulent Financial*

*Reporting* (yang lebih dikenal dengan sebutan *The Treadway Commission Report*) menghasilkan kajian yang disebut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) adalah komite yang diorganisir oleh lima organisasi profesi yaitu : IIA (*The Institute of Internal Auditor*), AICPA (*American Institute of CPAs*), IMA (*The Association of Accountants and Financial Professionals in Business*), FEI (*Financial Executives International*), dan AAA (*American Accounting Association*) . COSO mengeluarkan definisi tentang pengendalian internal pada tahun 1992.<sup>3</sup> COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. COSO juga membuat jelas bahwa pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pengendalian bukanlah sesuatu yang ditambahkan ke dalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral (bagian tidak terpisahkan) dalam proses tersebut.<sup>4</sup>

Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian perusahaan

---

<sup>3</sup> Edi Purwono, *Aspek-aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.119.

<sup>4</sup> Sanyoto Gondodiyoto, *Audit Sistem Informasi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h.266

AS dikeluarkan oleh committee of sponsoring organization (COSO). Komponen pengendalian internal COSO meliputi: lingkungan pengendalian internal, pengendalian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi, serta pemantauan.<sup>5</sup>

#### a. Lingkungan Pengendalian

Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya mungkin tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut.

Inti dari keberhasilan dalam pengendalian entitas secara efektif terletak pada sikap manajemen. Jika manajemen puncak sangat fokus terhadap pengendalian, maka anggota entitas lainnya juga akan bersikap demikian. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor perlu

mempertimbangkan sub komponen dari lingkungan pengendalian itu sendiri, yaitu:

#### 1) Integritas dan nilai-nilai etis.

Sub komponen ini meliputi tindakan manajemen untuk mencegah karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Caranya adalah melalui sosialisasi kepada karyawan perihal nilai-nilai entitas yang harus dijunjung tinggi serta standar perilaku yang harus dipegang teguh dan dijalankan oleh seluruh karyawan. Integritas dan nilai-nilai etis ini dituangkan dalam sebuah standar etika atau kode perilaku.

#### 2) Komitmen pada kompetensi.

Meliputi pertimbangan manajemen tentang persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi bagi pekerjaan tertentu. Setiap karyawan diharapkan dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya.

#### 3) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit

---

<sup>5</sup> Hery, *Auditing (Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi)* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h.90.

Dewan komisaris mewakili pemegang saham dalam mengawasi jalannya kegiatan entitas yang dilakukan atau dikelola manajemen. Dewan komisaris berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen (selaku pihak yang dipercayakan oleh pemilik modal untuk mengelola dana perusahaan) telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan secara layak. Untuk membantu melakukan pengawasan terhadap manajemen, dewan membentuk komite audit yang diberikan tanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen.

#### 4) Filosofi dan gaya operasi manajemen

Manajemen melalui prinsip dan sikapnya memberikan isyarat tertentu bagi para karyawannya mengenai arti penting pengendalian internal. Sebagai contoh apakah manajemen sering melakukan tindakan yang mengandung risiko yang cukup besar bagi entitas, atau justru cenderung menghindari risiko? Apakah manajemen menetapkan target penjualan dan tingkat laba yang terlalu besar (tidak realistis) dan apakah karyawan didorong untuk melakukan tindakan yang agresif guna memenuhi harapan target tersebut? dengan

memahami gaya pengelolaan manajemen, auditor dapat merasakan sikap manajemen tentang pengendalian internal.

#### 5) Struktur organisasi

Struktur organisasi menunjukkan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang ada dalam setiap divisi atau bagian. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari perihal pengelolaan entitas dan unsure-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian atas pengelolaan tersebut diterapkan.

#### 6) Kebijakan perihal sumber daya manusia

Karyawan yang tidak kompeten atau tidak jujur dapat merusak sistem, meskipun ada banyak pengendalian yang diterapkan. Karyawan yang jujur dan kompeten mampu mencapai kinerja yang tinggi meskipun hanya ada sedikit pengendalian. Akan tetapi karyawan yang jujur dan kompeten bisa juga dapat terganggu kinerjanya sebagai akibat dari perasaan bosan, tidak puas, ataupun masalah pribadi lainnya. Karena pentingnya sumber daya manusia bagi keberhasilan sebuah entitas, metode atau kebijakan untuk mengangkat, mengevaluasi melatih, mempromosikan dan memberi kompensasi kepada

karyawan merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal. b. Penilaian Risiko

Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai contoh, jika perusahaan sering mengalami kesulitan dalam menagih piutang usaha, maka perusahaan harus menyelenggarakan pengendalian yang memadai untuk mengatasi risiko lebih saji piutang usaha.

Penilaian risiko oleh manajemen berbeda dengan penilaian risiko oleh auditor walaupun ada keterkaitannya. Apabila manajemen menilai risiko sebagai bagian dari perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal untuk memperkecil kekeliruan serta kecurangan, sedangkan auditor menilai risiko untuk memutuskan jenis dan cakupan bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Jika manajemen secara efektif menilai dan menanggapi risiko tersebut, biasanya auditor akan mengumpulkan lebih sedikit bukti audit dari pada jika manajemen gagal dalam mengidentifikasi atau menindaklanjuti risiko yang signifikan.

Auditor dapat mengetahui proses penilaian risiko yang dilakukan manajemen melalui penggunaan kuisioner atau diskusi dengan manajemen terkait untuk menentukan bagaimana manajemen klien mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan, mengevaluasi signifikan dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi risiko yang muncul.

#### c. Aktivitas Pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai entitas. Sebenarnya ada banyak aktivitas pengendalian semacam ini dalam entitas manapun, termasuk pengendalian manual dan terotomasi. Aktivitas pengendalian biasanya dibagi menjadi 5 jenis berikut ini, yang akan dibahas berikutnya:<sup>6</sup>

##### 1) Pemisahan tugas

Pemisahan tugas disini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada dua bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip

---

<sup>6</sup> Alvin A. Arens., dkk, *Auditing dan Jasa Assurance* (Jakarta: Erlangga, 2015), h.349.

pemisahan tugas ini yaitu: (1) pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula (2) harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dan karyawan yang menangani langsung aktiva secara fisik. Sesungguhnya rasionalisasi dari pemisahan tugas adalah bahwa tugas pekerjaan dari karyawan seharusnya dapat memberikan dasar yang memadai untuk mengevaluasi pekerjaan karyawan lainnya. Jadi, hasil pekerjaan seorang karyawan dapat diperiksa silang (*cross check*) kebenarannya oleh karyawan lain. Ketika seorang karyawan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan biasanya potensi munculnya kesalahan maupun kecurangan akan meningkat. Oleh sebab itu, sangatlah penting kalau pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula.

## 2) Otorisasi yang tepat atas transaksi

Agar pengendalian berjalan dengan baik, setiap transaksi harus diotorisasi dengan tepat. Sebagai contoh, transaksi pembayaran kas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan

terlebih dahulu dari pihak lain yang berwenang. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa kas hanya dibayarkan atas transaksi yang telah diotorisasi sebagaimana mestinya. Sesungguhnya, karakteristik yang paling utama dari pengendalian internal adalah penetapan tanggung jawab ke masing-masing karyawan secara spesifik. Penetapan tanggung jawab disini agar supaya masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu yang telah dipercayakan kepadanya. Pengendalian atas pekerjaan tertentu akan menjadi lebih efektif jika hanya ada satu orang saja yang bertanggung jawab atas sebuah tugas tertentu.

Penetapan tanggung jawab disini tentu saja meliputi pemberian otorisasi untuk menyetujui atas sebuah transaksi. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan dagang yang meliputi penjualan barang dagangan secara kredit kepada para pelanggannya, maka biasanya setiap transaksi penjualan kredit haruslah terlebih dahulu meminta persetujuan dari manajer kredit, selaku orang yang memang benar-benar memiliki wewenang untuk memberikan kredit kepada si calon pembeli. Untuk

menjamin pengendalian internal yang baik, maka dalam kasus pemberian kredit ini sebaiknya manajer kreditlah, bukan manajer penjualan yang memiliki wewenang untuk menganalisis kelayakan kredit si calon pembeli.

3) Dokumen dan catatan yang memadai  
Dokumen dan catatan merupakan objek fisik di mana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan. Contohnya adalah faktur penjualan, surat pesanan pembelian, jurnal penjualan dan pembelian, kartu hadir karyawan, kartu persediaan, dan laporan penerimaan barang. Dokumen memadai sangat penting untuk mencatat transaksi dan mengendalikan aktiva. Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi. Dengan membubuhkan atau memberikan tanda tangan ke dalam dokumen orang yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah transaksi atau peristiwa dapat diidentifikasi dengan mudah. Dokumentasi atas transaksi seharusnya dibuat ketika transaksi terjadi.

4) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

Untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, aktiva catatan harus dilindungi. Jika tidak diamankan sebagaimana mestinya, aktiva dapat dicuri, diselewengkan, atau disalahgunakan. Demikian juga dengan catatan, jika tidak dilindungi secara memadai, catatan bisa dicuri, rusak, atau hilang. Yang dapat sangat membantu dalam proses pencatatan akuntansi dan operasi normal bisnis perusahaan. Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik sangatlah penting. Pengendalian fisik terutama terkait dengan pengamanan aktiva. Pengendalian mekanik dan elektronik sangatlah penting. Pengendalian fisik terutama terkait dengan pengamanan aktiva. Pengendalian mekanik dan elektronik juga mengamankan aktiva. Berikut ini adalah beberapa macam contoh dari penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik: (1) uang kas dan surat-surat berharga sebaiknya disimpan dalam *safe deposits box* (2) catatan-catatan akuntansi yang penting juga harus disimpan dalam *filig cabinet* yang terkunci (3) tidak semua tau sembarang karyawan dapat keluar masuk gudang tempat penyimpanan

persediaan barang dagang. (4) penggunaan kamera dan televisi monitor (5) adanya sistem pemadam kebakaran atau alarm yang memadai. (6) penggunaan *password system*.

#### 5) Pemeriksaan independen atau vertical internal

Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Prinsip ini meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda. Untuk memperoleh manfaat yang maksimum dari pengecekan independen atau verifikasi interna, maka (1) verifikasi seharusnya dilakukan secara periodik/berkala atau bisa juga dilakukan atas dasar dadakan (2) verifikasi sebaiknya dilakukan oleh orang yang independen (3) ketidakcocokan dan kekecualian seharusnya dilaporkan ke tingkatan manajemen yang memang dapat mengambil tindakan korektif secara tepat. d. Informasi dan komunikasi akuntansi Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan

dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi, yaitu :<sup>7</sup> (1) transaksi yang dicatat memang ada (2) transaksi yang ada sudah dicatat (3) transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar (4) transaksi yang dicatat di posting dan diikhtisarkan dengan benar (5) transaksi diklasifikasikan dengan benar (6) transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Dengan kata lain, sistem akuntansi harus dirancang untuk memastikan perihal keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisaran, klasifikasi, dan penetapan waktu transaksi dicatat.

#### e. Pemantauan

Yaitu suatu proses yang menilai mutu dari kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.<sup>8</sup> Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam

---

<sup>7</sup> Hery, *Auditing (Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi)* (Jakarta:Kencana Permada Media Group, 2011), h.100.

<sup>8</sup> Hamzah Halim, *Legal Audit dan Legal Opinion* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.3.

perusahaan. Informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, umpan balik dari personel operasional dan lainnya.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut. Analisa deskriptif adalah analisa yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>9</sup>

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dan unsur-unsur pengendalian intern. Pengumpulan data ini bersumber dari berbagai referensi yang ada,

baik dari buku, halaman web maupun dari penelitian sebelumnya.

- b. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian pembiayaan dan pengendalian internal dengan cara wawancara langsung yang terkait dengan penelitian.
- c. Membandingkan sistem pengendalian yang diterapkan dengan teori yang terdapat dengan referensi yang berdasarkan kerangka konseptual COSO (*Committee of Sponsoring Organization*).
- d. Menarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai sistem pemberian pembiayaan dan hasil sistem pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian pembiayaan usaha kecil dan menengah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

### 4. PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perbankan dalam menunjang efektivitas usaha kecil dan menengah dalam kaitannya dengan pemberian pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan berdasarkan

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Cet IV*, ( Bandung; CV. Alfabeta, 2008) h.335.

komponen COSO (*Committee of Sponsoring Organization*).

#### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian terdiri dari integritas dan nilai-nilai etis, komitmen pada kompetensi, partisipasi dewan komisaris dan komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi dan kebijakan perihal sumber daya manusia. Secara umum, lingkungan pengendalian yang ada pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan adalah sebagai berikut:

##### 1) Integritas dan nilai-nilai etis

Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan menerapkan dan menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai etis pada seluruh karyawannya. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh manajemen mengenai kode etik dan tata cara berperilaku. Kemudian peraturan-peraturan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, dan harus dijalankan oleh setiap karyawan. Salah satunya adalah tidak boleh menerima apapun dari nasabah.

Apabila karyawan tersebut melanggar, dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang didapat bermacam dan melalui beberapa tahapan, apabila karyawan tersebut melanggar, tetapi belum merugikan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, maka dia akan diberi surat peringatan. Tetapi apabila karyawan tersebut sudah merugikan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan atau melakukan kecurangan, maka karyawan tersebut akan ditindak tegas yaitu dikeluarkan atau dapat dilakukan upaya jalur hukum.

Melalui peraturan yang telah ditetapkan untuk dijalankan oleh setiap karyawan, diharapkan mampu mengurangi godaan yang mengakibatkan karyawan akan bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak etis. Dalam melaksanakan transaksi pembiayaan, integritas dan nilai etika karyawan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan cukup baik, hal ini terlihat dari kejujuran karyawan dalam mencatat dan melakukan transaksi pembiayaan sehingga mampu mendorong terlaksananya pemberian pembiayaan yang efektif.

##### 2) Komitmen pada kompetensi

Kompetensi menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaan yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Hal ini dapat terlihat dari setiap karyawan yang di tempatkan pada posisi sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Seperti adanya uraian tugas yang menguraikan tugas tertentu juga menjadi salah satu bukti terhadap komitmen manajemen dalam kompetensi. Dan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan juga memiliki buku panduan dalam sistem pemberian pembiayaan yang harus dipahami setiap karyawan.

### 3) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit

Pada PT. Bank BNI Syariah memiliki *audit internal* di pusat. Dan khusus di cabang Medan juga memiliki *internal control* yang mempunyai tugas untuk mengontrol PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan tetap pada prosedur yang telah ditetapkan, agar tidak keluar jalur atau terjadi penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan, maka akan ditegur oleh *internal control* di cabang Medan. Pada pembiayaan, yang melakukan pemeriksaan khusus juga *internal control* yang ada di cabang Medan. Dan adapula pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap tahun, oleh *internal audit*, *eksternal audit* dan juga OJK.

Pemeriksaan yang dilakukan terkait pembiayaan meliputi kesesuaian prosedur administrasi, pelanggaran aturan, dan memastikan semua sudah dijalankan sesuai prosedur.

### 4) Filosofi dan gaya operasi manajemen

Dengan gaya operasi manajemen yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan yaitu menganut prinsip syariah dengan tidak menetapkan tingkat keuntungan atau laba yang terlalu tinggi dan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dapat dilihat adanya pengendalian dalam pemberian pembiayaan. Seperti dilihat dari hasil wawancara, sistem pemberian pembiayaan yang ada dilakukan dengan mudah dan cepat. Dan dilihat dari gaya operasinya sudah ada pemisahan fungsi yang jelas sehingga setiap bagian bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing.

### 5) Struktur organisasi

Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan memiliki struktur organisasi yang jelas yang menerangkan setiap pembagian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan. Dalam hal pembiayaan, hanya petugas yang

berwenang yang berhak memutuskan pemberian pembiayaan.

6) Kebijakan perihal sumber daya manusia

Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan memiliki kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam rangka mendapatkan karyawan yang jujur dan kompeten dalam menjalankan tugas yang diberikan. Dan PT. Bank BNI Syariah juga memiliki buku pedoman kepegawaian yang berfungsi untuk mengarahkan karyawan ketika menjalankan tugas. Sehingga akan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang akan terjadi.

**b. Penilaian Risiko**

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan melakukan penilaian risiko guna mengurangi terjadinya risiko pembiayaan yang mungkin timbul. Penaksiran risiko tersebut seperti :

- 1) Karyawan baru dalam aktivitas pemberian pembiayaan. Untuk mengurangi risiko yang terjadi akibat adanya karyawan baru yang ditempatkan dalam aktivitas pemberian pembiayaan, manajemen melakukan pelatihan kerja selama 1 bulan untuk diberi pelatihan dan arahan yang

memadai dalam pelaksanaan tugas yang diberikan pada karyawan baru.

- 2) Teknologi dalam pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan menggunakan teknologi dan informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, yaitu dengan memanfaatkan komputer dalam membuat laporan pemberian pembiayaan dan penyimpanan data pembiayaan menggunakan komputer. Hal ini dilakukan agar mengurangi tingkat risiko yang mungkin terjadi saat pelaporan pemberian pembiayaan dari kemungkinan terjadinya risiko kehilangan berkas atau kecelakaan tempat kerja seperti kebakaran.
- 3) Perubahan struktur organisasi. Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, pertukaran karyawan juga dilakukan secara bertahap untuk mengurangi risiko kejenuhan karyawan terhadap tugasnya yang akan berdampak pada tidak berjalan dengan efektif kegiatan pemberian pembiayaan. Maka dari itu perlu dilakukan mutasi antara satu kantor dan sesama kantor cabang.
- 4) Penggunaan prinsip akuntansi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Medan menggunakan prinsip akuntansi yang berbasis syariah. Selalu konsisten terhadap kebijakan prinsip akuntansi yang diterapkan. Sehingga laporan keuangan yang diberikan selalu bisa menjadi pembanding dari tahun ke tahun mengenai pembiayaan dan lain-lain.

### c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan arahan dari manajemen. Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah dalam kaitannya dengan pemberian pembiayaan adalah :

- 1) Pemisahan tugas. Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dapat dilihat bahwasannya pemisahan tugas yang di jalankan setiap karyawannya berbeda. Hal ini terlihat dari adanya struktur organisasi yang ada, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Contohnya seperti hanya petugas pembiayaan yang berhak melakukan pemutusan pembiayaan.
- 2) Otorisasi yang tepat atas transaksi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dalam hal pemberian

pembiayaan akan dilakukan setelah mendapat otorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen yang lengkap. Di mana SME Business Manager (SNM) adalah pejabat yang berhak melakukan otorisasi pada setiap transaksi yang dilakukan terkait dengan pemberian pembiayaan.

- 3) Dokumen dan Catatan yang Memadai Dalam melakukan transaksi pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan selalu dicatat dalam dokumennya masing-masing. Bukti transaksi yang ada seperti slip, berkas penandatanganan akad pembiayaan, dan bukti lainnya dicatat dan disimpan oleh bagian-bagiannya masing-masing. Seperti pihak administrasi pembiayaan, akuntansi, teller dan customer service.
- 4) Pengendalian Fisik Atas Aktiva dan Catatan Dalam hal penyelenggaraan pengendalian internal yang memadai pada aktiva dan catatan, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan setiap bagian menggunakan lemari arsip untuk penyimpanan catatan-catatan. Begitu pula bagian pembiayaan, memiliki lemari khusus untuk menyimpan data pembiayaan. Dan menyimpan sebagiannya di

ruangan penyimpanan berkas, di mana tidak semua karyawan boleh masuk ke dalam ruangan tersebut. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan juga menggunakan kamera pengawas disetiap sudut ruangan Bank BNI sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan yang dilakukan oleh karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

- 5) Pemeriksaan Independen atau Verifikasi Internal PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan selalu mengadakan pengecekan independen atau verifikasi ulang dengan melakukan peninjauan ulang terhadap karyawan dan kinerja yang selama ini telah dijalankan. Peninjauan ulang ini dilakukan oleh auditor internal yang ada di Kantor Cabang Medan. Dalam hal pembiayaan, untuk menguji kesesuaian antara pemberian pembiayaan dengan data kas yang diterima dilakukan dengan pengecekan berkala yang dilakukan oleh auditor internal.

#### **d. Informasi dan Komunikasi Akuntansi**

Dalam hal informasi dan komunikasi akuntansi pengendalian yang dilakukan berkaitan pemberian pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan adalah :

- 1) Adanya sistem informasi yang mencakup metode dan catatan yang menunjukkan dan mencatat semua transaksi pemberian pembiayaan secara sah.
- 2) Adanya sistem informasi yang mencakup metode dan catatan untuk menunjukkan bahwa semua transaksi pemberian pembiayaan sudah dicatat dengan benar.
- 3) Adanya sistem informasi yang mencakup metode dan catatan untuk mengukur nilai transaksi pemberian pembiayaan yang benar dalam mencatat nilai moneternya di dalam laporan keuangan.
- 4) Adanya sistem informasi yang mencakup metode dan catatan dalam hal posting dan pengikhtisaran yang benar atas transaksi-transaksi pemberian pembiayaan.
- 5) Adanya sistem informasi yang mencakup metode dan catatan untuk menggambarkan dengan dasar yang tepat atas transaksi-

transaksi yang cukup rinci untuk membenarkan pengklasifikasian dari transaksi dalam laporan keuangan.

- 6) Adanya sistem informasi yang mencakup metode dan catatan untuk menunjukkan bahwa transaksi pemberian pembiayaan yang dilakukan telah dicatat sesuai tanggal dengan benar.

#### e. Pemantauan<sup>10</sup>

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkala oleh manajemen. Pemantauan pengendalian internal khususnya di bidang pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dilakukan oleh auditor internal yang ada di Bank. Auditor internal ini bertugas melakukan pemantauan dan menilai efektifitas rancangan dan operasi pengendalian internal pemberian pembiayaan atau dengan kata lain memantau kegiatan operasional pembiayaan. Pemantauan terhadap nasabah dilakukan oleh petugas pembiayaan minimal 6 bulan sekali. Sistem pengendalian internal (SPI) dapat

---

<sup>10</sup> Hery, *Auditing (Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi)* (Jakarta:Kencana Permada Media Group, 2011), h.90.

dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan atau makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan berinteraksi satu sama lain di arahkan untuk melindungi harta, menjamin terhadap terjadinya hutang yang tidak layak, menjamin ketelitian dan dapat diperolehnya operasi secara efisien, menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.<sup>11</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Paramhyta, Puspitaningyas, dan Suhartono didapat kesimpulan yang menyatakan bahwa aktivitas pengendalian di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kasiyan Cabang Jember Jawa Timur dimulai dari sebelum kredit sampai pelunasan kredit pada calon nasabah sudah efektif dan aktivitas pengendalian yang diimplementasikan berorientasi untuk meminimalisir adanya kredit macet.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Hartadi, *Sistem Pengendalian Internal dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit* ( Yogyakarta: BPFE Edisi ketiga, 1999), h. 3.

<sup>12</sup> Rara Olyvya Paramitha, Zahra Puspitaningyas dan Suhartono, "*Penerapan Sistem Pengendalian Internal Prosedur Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kasiyan Cabang Jember Jawa Timur*", Vol.--, h.12.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Sari didapatkan kesimpulan bahwa 1). Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dalam sistem pemberian kredit mikro dapat dilihat baik secara umum. 2). Penaksiran Resiko. Secara umum penaksiran resiko yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sudah memadai atau sudah baik. 3). Informasi dan Komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia sudah baik. 4).Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sudah baik. 5). Pemantauan. Pemantauan yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia dalam sistem pemberian kredit sudah baik.<sup>13</sup>

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Harun didapat kesimpulan bahwa penerapan pengendalian intern dalam pemberian kredit sudah efektif sesuai dengan teori pengendalian intern yang baik menurut COSO hanya saja belum terdapat badan struktur organisasi

---

<sup>13</sup> Linda Mega Sari, “Penerapan Implementasi Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”, Vol.--, h.13.

dalam BRI Kantor Cabang Pembantu Manado.<sup>14</sup><sup>52</sup>

Berdasarkan penelitian, teori dan jurnal menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dilakukan antara entitas untuk memperoleh operasi secara efisien dan diimplementasikan berorientasi untuk meminimalkan adanya risiko pembiayaan, dan pelaksanaan pengendalian internal yang baik dan memadai dapat diterapkan dengan menggunakan teori yang baik menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Sistem pemberian pembiayaan yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan prosesnya tidak terlalu sulit dan cukup mudah. Sehingga mudah

---

<sup>14</sup> Hesty Harun, “Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Pada BRI KCP Manado”, Vol.1 No.3, h.10.

dipahami dan dapat memperlancar proses pemberian pembiayaan kepada nasabah. Dengan pemberian pembiayaan yang cepat dan proses yang akan dibantu oleh petugas pembiayaan, di mana prosesnya dimulai dari mengajukan permohonan pembiayaan, menganalisis usaha calon nasabah, mengambil keputusan pemberian pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan, dan melakukan pembayaran pembiayaan yang dilakukan dengan cara cicilan setiap bulan.

- 2) Sistem pengendalian internal yang dijalankan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan dalam proses pemberian pembiayaan telah memenuhi komponen-komponen pengendalian internal menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization). PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan mempunyai struktur pengendalian internal dalam pemberian pembiayaan untuk mencegah adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pada PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Medan

telah sesuai dengan teori-teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian pembiayaan yang efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alvin A. Arens.,dkk, *Auditing dan Jasa Assurance*, Jakarta:Erlangga, 2015.
- Gondodiyoto, Sanyoto, *Audit Sistem Informasi* Jakarta:Mitra Wacana Media, 2007.
- Halim, Hamzah, *Legal Audit dan Legal Opinion* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hartadi, Bambang, *Sistem Pengendalian Internal dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*, Yogyakarta: BPFE Edisi ketiga, 1999
- Harun Hesty, “Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Pada BRI KCP Manado”, Vol.1 No.3
- Hery, *Auditing (Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi)* Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Perss, 2010
- Paramitha, Rara Olyvya, Zahra Puspitaningyas dan Suhartono, “Penerapan Sistem Pengendalian

*Internal Prosedur Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kasiyan Cabang Jember Jawa Timur*”, Vol.--, h.12.

Purwono, Edi, *Aspek-aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Sari, Linda Mega, “*Penerapan Implementasi Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*”, Vol.--, h.13.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Cet IV*, Bandung; CV. Alfabeta, 2008.

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)